

Memperingati Hari Maritim Nasional (23 September)

INDONESIA MENUJU *Poros Maritim* DUNIA



Dari Redaksi

Indonesia telah mengidentifikasi 17.499 pulau yang membentang antara Sabang sampai Merauke dengan total luas wilayah mencapai 7,81 juta km². Seluas 5,8 juta km² merupakan wilayah perairan Indonesia dengan garis pantai sepanjang 81 ribu km. Secara lebih rinci 3,25 km² adalah luas wilayah lautan sedangkan 2,55 juta km² merupakan luas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Pada tahun 1957 melalui Deklarasi Djuanda, Indonesia ditetapkan sebagai negara kepulauan, diperkuat dengan Konvensi Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Posisi laut Indonesia juga sangat strategis yaitu berada di antara Samudra Pasifik dan Hindia. Hal ini menjadikan laut Indonesia sebagai jalur perdagangan global yang menghubungkan kawasan Asia Pasifik dan Australia.

Indonesia tidak hanya memiliki posisi yang strategis untuk jalur perdagangan, laut Indonesia juga memiliki keanekaragaman sumber daya alam. Dilihat dari kekayaan biota laut, Indonesia menyimpan sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 biota terumbu karang. Dilihat dari hal tersebut, Indonesia termasuk salah satu negara eksportir komoditas laut dan perikanan terbesar di dunia.

Untuk mengingatkan keanekaragaman kekayaan laut Indonesia serta membangun kekuatan maritim, diperingatilah Hari Maritim Nasional pada tanggal 23 September.

Indonesia Maju Menuju Poros Maritim Dunia!

Tim Redaksi e-Warta Geospasial

Pengarah : Muhtadi Ganda Sutrisna
Penanggung Jawab : Suprajaka
Redaktur : Mone Iye C. Marschiavelli
Editor : Luciana Retno Prastiwi,
Kesturi Haryunani P., Intan Pujawati
Desain : Ellen S., M. Afif, Raditya P.
Juru foto : Ivan Setiawan, Edwin Rico
Sekretariat : Hanie N. Sabita, Maryanto
Pembuat artikel :
Sri Mardia Ningsih, Ellen Suryanegara,
Nurmitha Atmia, Maya Scoryna P.,
Tommy Nautico, Agung Teguh M.,
Bramanto Apriandi, Abdi Maulana,
Farrah Leovita P., Huswantoro Anggit,
Luthfia N.Rahman

Sekretariat e-Warta Geospasial

Kelompok Kerja Humas & Kerja Sama
Badan Informasi Geospasial
Jl. Raya Jakarta Bogor Km 46
Cibinong, Jawa Barat 16911
Email :
wartageospasial.big@gmail.com

*Seluruh foto dalam warta ini diambil dari:
Dokumentasi Tim Humas BIG

Menilik Kekayaan Laut Indonesia yang Berlimpah

Apa Saja?

Mengacu pada SK Nomor 249 tahun 1964, Hari Maritim Nasional ditetapkan pada tanggal 23 September setiap tahunnya. Laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), menyatakan bahwa penetapan Hari Maritim Nasional tersebut didasarkan pada hasil Musyawarah Nasional Maritim I yang berlangsung pada 23 September 1963. Sejak saat itu, perayaan Hari Maritim Nasional setiap tahunnya menjadi ajang bagi pemerintah untuk selalu mengingat misi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia pada 2045.

Dilansir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada tahun 2022 nilai ekspor produk perikanan Indonesia mencapai US\$ 6,24 miliar dengan volume 1,22 juta ton. Nilai ekspor produk perikanan Indonesia mengalami kenaikan 9,15% dibanding tahun sebelumnya yang hanya sampai US\$ 5,72 juta. Selama satu dekade terakhir, nilai ekspor perikanan cenderung meningkat dan mencapai rekor terbesar pada tahun 2022.

Dilihat lebih rinci, udang menjadi komoditas hasil laut dengan nilai ekspor terbesar yakni mencapai angka US\$ 2,16 miliar dengan volume 241.201 ton. Namun, angka ini mengalami penurunan 3,22% dari tahun sebelumnya yakni sebesar US\$ 2,23 miliar.





Lokasi: Pasar Ikan Tarempa, Kepulauan Anambas

Sumber: Dokumentasi Tim Humas BIG (2023)

Koordinat: 3°13'04,1" LU; 106°12'55,8" BT

Komoditas perikanan lainnya, seperti ekspor tuna, tongkol, dan cumi dicatat KKP sebesar US\$960,27 juta dengan volume 194.723 ton. Selanjutnya, ekspor sotong dan gurita mencapai US\$737,13 juta dengan volume 157.723 ton.

Tidak hanya binatang laut, pada tahun 2022 Indonesia juga mengekspor rumput laut senilai US\$ 600,36 juta dengan berat 253.680 ton dan ekspor rajungan kepiting dari Indonesia senilai US\$484,23 juta dengan volume 29.177 ton. Nilai ekspor hasil laut lainnya sebesar US\$ 1,3 miliar dan volume ekspor dari komoditas tersebut sebanyak 347.555 ton.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta, bulan September 2023 menghasilkan kesepakatan penting bagi pertumbuhan ekonomi kelautan. Pada *Chairman's Statement*, para pemimpin bersepakat mengadopsi ASEAN *Blue Economy Framework* untuk menciptakan rantai nilai sumber daya laut secara inklusif dan berkelanjutan, dengan membangun ekonomi biru sebagai media untuk meningkatkan pertumbuhan di kawasan.

Indonesia memiliki garis pantai 108 ribu kilometer dan merupakan produsen perikanan terbesar kedua di dunia, serta memiliki wilayah terumbu karang terluas kedua di dunia dengan luas sekitar 2,5 juta hektar. Sektor laut di Indonesia memang sudah selayaknya menjadi sumber penggerak perekonomian lokal dan nasional.

Untuk mendorong penerapan *Blue Economy* di ASEAN, khususnya di Indonesia, upaya kolaboratif dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan dilakukan. Berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang dimaksud dengan Ekonomi Biru Indonesia adalah pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan, konservasi laut, dan sumber daya pesisir serta ekosistemnya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda.

Pengelolaan kelautan secara berkelanjutan merupakan kunci untuk menjamin bisnis sektor kelautan yang dilakukan untuk mencapai keuntungan dengan cara-cara yang tidak merusak ekosistem laut.



Cara Indonesia **Membangun Kekuatan Maritim di Wilayah Laut**

Untuk menuju negara Poros Maritim Dunia meliputi pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, sosial-budaya, hukum, keamanan, politik, dan ekonomi. Adapun program-program utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yaitu penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversitas, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan.

Presiden Joko Widodo mencanangkan lima pilar utama untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia, di antaranya:

1. Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia;
2. Berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama;
3. Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim;
4. Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan;
5. Membangun kekuatan pertahanan maritim.

“Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa”

Untuk mengawal visi Laut Masa Depan Bangsa dan mendukung misi nawacita, KKP terus mendorong pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan dengan berbagai kebijakan.

Kebijakan KKP tersebut diterjemahkan ke dalam misi tiga pilar, yakni:

- **Kedaulatan**, yakni mandiri dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi, yang dilakukan melalui pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati perikanan.
- **Keberlanjutan**, yakni mengadopsi konsep *blue economy* dalam mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan dengan bertanggung jawab dengan prinsip ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan produktivitas, yang dilakukan melalui pengelolaan ruang laut; pengelolaan keanekaragaman hayati laut; keberlanjutan sumber daya dan usaha perikanan tangkap dan budidaya; serta penguatan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan.
- **Kesejahteraan**, yakni mengelola sumber daya kelautan dan perikanan untuk kemakmuran rakyat, yang dilakukan melalui pengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

Indonesia terus memperkuat jati diri sebagai negara maritim dengan cara pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing* serta pengembangan ekonomi maritim dan kelautan. Pemberantasan *IUU fishing* telah menjadi prioritas utama pemerintah untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan.

Pengelolaan dan pemanfaatan sektor kemaritiman harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, guna menjaga kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan NKRI.



Lokasi: Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur

Sumber: Dokumentasi Tim Humas BIG (2021)

Koordinat: 8°29'30" LS; 119°52'36" BT

Peran BIG dalam pengajuan perluasan landas kontinen Indonesia

Indonesia memiliki potensi untuk memperluas landas kontinen seluas 657.886,6 km² atau seluas 1,5 kali Pulau Sumatera. Penambahan luas landas kontinen Indonesia ini berpotensi menjadi ladang cadangan sumber daya migas dan mineral untuk Indonesia di masa mendatang.

Pada tahun 2022 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York, Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen di Luar 200 Mil Laut didampingi Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB Muhammad Koba menyampaikan dokumen submisi klaim perluasan landas kontinen untuk area selatan Pulau Jawa-Nusa Tenggara. Dokumen tersebut berisi bukti bahwa dasar laut Roo Rise merupakan kelanjutan alami dari landas kontinen Indonesia sehingga Indonesia berhak atas area seluas 245.711 km².

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (The United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) 1982, setiap negara pantai dapat memperluas landas kontinen hingga 350 mil laut di luar 200 mil laut jika dapat membuktikan adanya keberlanjutan alamiah (*natural prolongation*) dari landas kontinennya.

Dibanding tiga submisi sebelumnya, submisi area selatan Pulau Jawa-Nusa Tenggara merupakan submisi terluas.



Submisi landas kontinen sebelumnya antara lain:

- Pada 2011, Indonesia mendapatkan perselujuan rekomendasi penambahan area seluas 4.209 km² di barat Aceh;
- Pada 2019, Indonesia menyampaikan submisi untuk area utara Papua (196.568,9 km²);
- Pada 2020, Indonesia melakukan submisi untuk area barat daya Sumatra (211.397,7 km²).

Selain menyampaikan submisi perluasan landas kontinen di selatan Jawa-Nusa Tenggara, pemri juga mempresentasikan bukti submisi perluasan landas kontinen di barat daya Sumatra yang disampaikan pada 2020.

Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG, Mohamad Arief Syafii, bertindak sebagai ketua delegasi RI. Pada presentasi yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa area dasar laut di sekitar *Investigator Fracture Zone* dan *Wharton Fossil Ridge* merupakan kepanjangan alamiah landas kontinen dari Sumatra. Oleh karena itu, Indonesia berhak memperluas landas kontinennya sampai 211.397,7 km².

Lokasi Foto: Banyuwangi, Jawa Timur

Sumber: Dokumentasi Tim Humas BIG (2022)
Koordinat: 8°29'30" LS; 119°52'36" BT



Lokasi: Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur

Sumber: Dokumentasi Tim Humas BIG (2021)

Koordinat: 8°29'30" LS; 119°52'36" BT



“RUU tentang Landas Kontinen bertujuan untuk mengatur dan mengakomodasi perkembangan pengaturan mengenai landas kontinen di Indonesia”

– Nurul Arifin

(Ketua Pansus RUU Landas Kontinen)

Submisi perluasan landas kontinen Indonesia menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang ahli untuk mengolah data kelautan. Dalam proses penyiapan submisi, Tim Nasional Indonesia mengandalkan pakar dan tenaga dalam negeri meskipun Komisi Batas Landas Kontinen PBB menyediakan akses untuk tenaga asing.

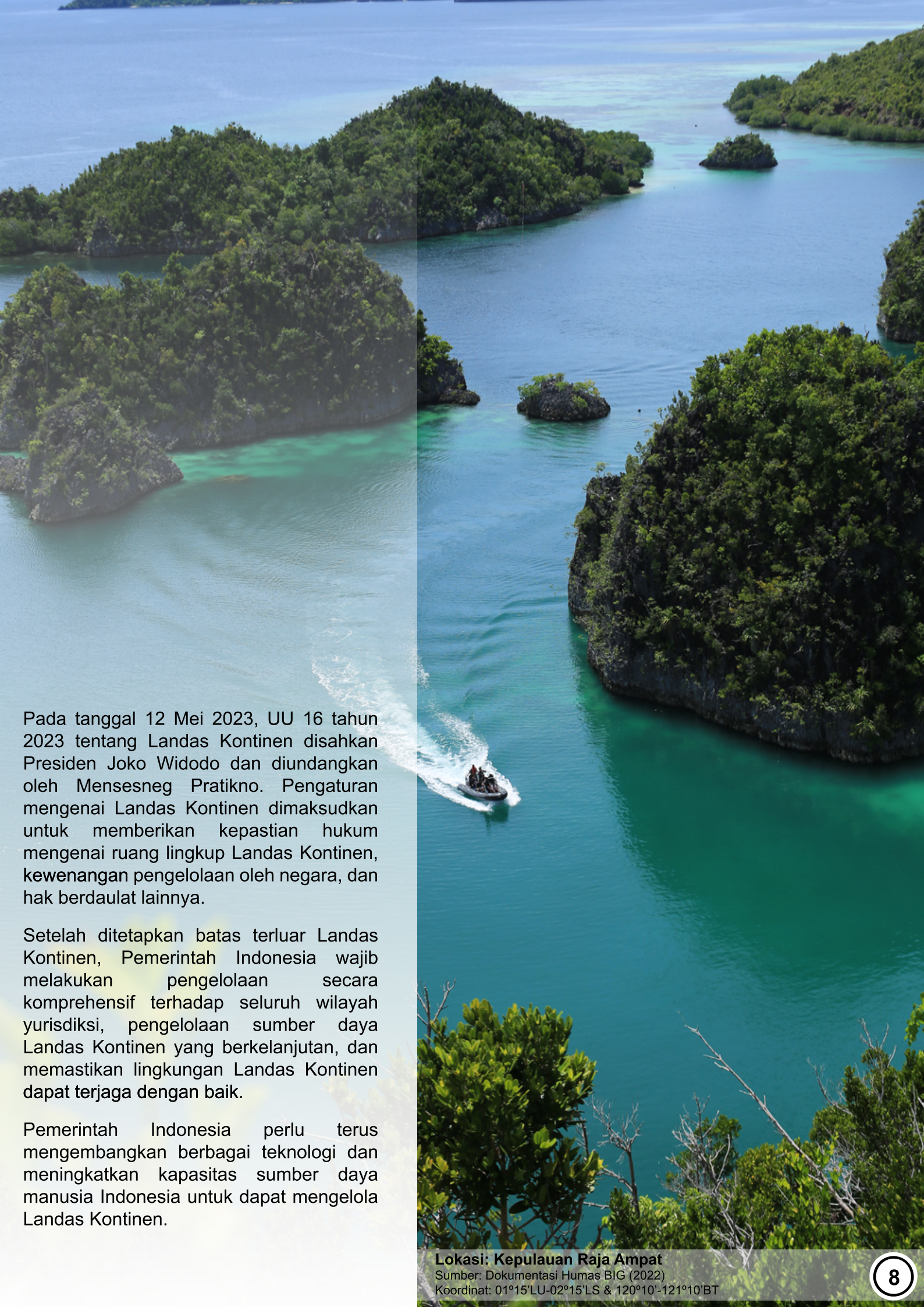
Sebagai catatan, Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan beranggotakan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Badan Informasi Geospasial, Badan Riset Inovasi Nasional, dan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut.

Tahun ini, saat Rapat Paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas Kontinen menjadi Undang-Undang (UU).

Beberapa substansi krusial yang dilakukan perubahan dalam pembahasan RUU yang terdiri dari 11 bab dan 59 pasal antara lain penyempurnaan berbagai istilah yang terdapat dalam RUU tentang Landas Kontinen dengan UNCLOS 1982; perubahan substansi mengenai penyidikan yang terdapat dalam Bab VII tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum, yakni memasukkan kepolisian sebagai penyidik tindak pidana di landas kontinen, selain TNI Angkatan Laut dan penyidikan pegawai negeri sipil dalam rangka penegakan hukum; perubahan substansi mengenai ketentuan pidana yang terdapat dalam Bab VIII tentang Ketentuan Pidana.

Pengelolaan landas kontinen dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Pendekatan keamanan dilakukan agar dalam pengelolaan landas kontinen menjamin keutuhan NKRI dan melindungi segenap bangsa. Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan agar dalam pengelolaan landas kontinen harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan berkelanjutan.





Pada tanggal 12 Mei 2023, UU 16 tahun 2023 tentang Landas Kontinen disahkan Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Mensesneg Pratikno. Pengaturan mengenai Landas Kontinen dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup Landas Kontinen, kewenangan pengelolaan oleh negara, dan hak berdaulat lainnya.

Setelah ditetapkan batas terluar Landas Kontinen, Pemerintah Indonesia wajib melakukan pengelolaan secara komprehensif terhadap seluruh wilayah yurisdiksi, pengelolaan sumber daya Landas Kontinen yang berkelanjutan, dan memastikan lingkungan Landas Kontinen dapat terjaga dengan baik.

Pemerintah Indonesia perlu terus mengembangkan berbagai teknologi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia untuk dapat mengelola Landas Kontinen.

Lokasi: Kepulauan Raja Ampat

Sumber: Dokumentasi Humas BIG (2022)

Koordinat: 01°15'LU-02°15'LS & 120°10'-121°10'BT